

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Jateng Pos
Media Online

Wilayah: Kota Pekalongan

Halaman 10

JKN Sedot APBD Belasan Miliar

PEKALONGAN – Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 11 M pada APBD tahun 2020 untuk pembiayaan iuran JKN-KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dicover APBD. Usulan diajukan karena adanya kenaikan besaran iuran PBI JKN-KIS kelas III yang ditetapkan dalam Perpres No 75 Tahun 2019 dari sebesar Rp 23.000 jadi Rp 42.000.

Kepala Dinkes Kota Pekalongan, Slamet Budiyo MKes mengatakan, kenaikan besaran iuran juga memiliki kaitan dengan Pemkot Pekalongan yakni untuk PBI yang dicover melalui APBD kota. "Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan PBI adalah Rp 13 M bagi sekitar 47 ribu peserta. Untuk tahun 2020, kami ajukan penambahan sebesar Rp 11 M. Sehingga pengajuan anggaran total untuk pembiayaan PBI JKN-KIS tahun 2020 yaitu Rp 24 M," tutur Slamet Budiyo.

Usulan itu, sudah diajukan dan sudah menjadi pembahasan baik di TAPD maupun Banggar. "Diajukan atau tidak, PBI JKN-KIS sudah menjadi kewajiban Pemkot Pekalongan. Kami sudah sampaikan perhitungannya sesuai kebutuhan dan sudah menjadi pembahasan TAPD maupun Banggar," tambahnya.

Jumlah peserta PBI JKN-KIS di Kota Pekalongan juga terus bertambah seiring dengan dilakukannya integrasi peserta hasil rekomendasi Dinsos P2KB ke JKN-KIS. Selama tahun 2019, setiap bulan setidaknya ada penambahan sebesar 200 hingga 300 peserta PBI JKN-KIS hasil integrasi. Belum lagi, adanya kemungkinan peserta mandiri yang sebelumnya membiayai sendiri iuran JKN-KIS yang diprediksi akan beralih menjadi peserta PBI. Hal serupa terjadi di Batang. Tahun depan, Pemkab menaikkan anggaran pembiayaan JKN-KIS warga miskin sebesar Rp 2,5 M. Jika tahun 2019, pagu pembiayaan BPJS untuk warga miskin di Kabupaten Batang ditetapkan sebesar Rp 13,5 M, maka di 2020 anggarannya membengkak menjadi Rp 16 M.

Kepala Dinas Kesehatan Batang, dr Hidayah Basbeth mengakui kenaikan anggaran itu dipicu naiknya iuran BPJS kesehatan. "Selain itu, mengantisipasi adanya tambahan warga miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," ucap Basbeth. Hingga September 2019, peserta PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Batang mencapai 445.038 jiwa. Terdiri dari 411.201 jiwa yang dibiayai anggaran pemerintah pusat. Dari pembiayaan provinsi sebanyak 10.377 jiwa, dan dari pembiayaan Pemkab Batang 23.460 jiwa. (Tahmid FM)